<table>
<thead>
<tr>
<th>Title</th>
<th>Author</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Analisis Bidang Sosial Politik Perluasan Kota Cimahi</td>
<td>Yaya M. Abdul Azis</td>
</tr>
<tr>
<td>Refleksi Kritis Terhadap Pilkada 2005</td>
<td>Iwan Satibi</td>
</tr>
<tr>
<td>Administrasi Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia</td>
<td>Achdiat</td>
</tr>
<tr>
<td>Komunikasi Politik Pemerintahan SBY-KALLA Pro Kontra Kenaikan Harga BBM 2005</td>
<td>Sutrisno</td>
</tr>
<tr>
<td>Perencanaan Sosial Budaya (Suatu Alternatif Strategi Kebijakan Dalam Upaya Menuju Masyarakat Madani)</td>
<td>Agus Alex Yanuar</td>
</tr>
<tr>
<td>Fungsi Parpol vs Pesona Pribadi Dalam Pilkada</td>
<td>Eyo Kahya</td>
</tr>
<tr>
<td>Pengaruh Implementasi Jiwa Kewirausahaan Pegawai Dan Kontrol Terhadap Peningkatan Potensi Retribusi Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung</td>
<td>Diana Arifin</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenaikan Harga BBM, Diantara Kebijaksanaan Negara Dan Kepentingan Publik</td>
<td>Deden Ramdan</td>
</tr>
<tr>
<td>Kemampuan Sumber Daya Manusia Daerah Dalam Merealisasikan Kebijakan Otonomi Daerah</td>
<td>Kamal Alamsyah</td>
</tr>
<tr>
<td>Model Aparatur Negara Dalam Perspektif Publik</td>
<td>Anang Usman dan Ida Hindarsyah</td>
</tr>
<tr>
<td>Article Title</td>
<td>Page</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>DAFTAR ISI</td>
<td>Halaman</td>
</tr>
<tr>
<td>EDITORIAL</td>
<td>i</td>
</tr>
<tr>
<td>Analisis Bidang Sosial Politik Perluasan Kota Cimahi</td>
<td>ii</td>
</tr>
<tr>
<td>Yaya M. Abdul Azis</td>
<td>1-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Refleksi Kritis Terhadap Pilkada Tahun 2005</td>
<td>13-18</td>
</tr>
<tr>
<td>Iwan Satibi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Administrasi Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia</td>
<td>19-24</td>
</tr>
<tr>
<td>Achdiat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Komunikasi Politik Pemerintahan SBY-KALLA</td>
<td>25-30</td>
</tr>
<tr>
<td>Pro Kontra Kenaikan Harga BBM 2005</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sutrisno</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Perencanaan Sosial Budaya</td>
<td>31-39</td>
</tr>
<tr>
<td>(Suatu Alternatif Strategi Kebijakan Dalam Upaya Menuju Masyarakat Madani)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Agus Alex Yanuar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fungsi Parpol vs Pesona Pribadi Dalam Pilkada</td>
<td>40-43</td>
</tr>
<tr>
<td>Eyo Kahya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pengaruh Implementasi Jiwa Kewirausahaan Pegawai Dan</td>
<td>44-53</td>
</tr>
<tr>
<td>Kontrol Terhadap Peningkatan Potensi Retribusi Daerah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Diana Ariffin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kenaikan Harga BBM, Diantara Kebijaksanaan Negara Dan</td>
<td>54-59</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepentingan Publik</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Deden Ramdan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kemampuan Sumber Daya Manusia Daerah Dalam Merealisasikan Kebijakan Otonomi Daerah</td>
<td>60-67</td>
</tr>
<tr>
<td>Kamal Alamsyah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Model Aparatur Negara Dalam Perspektif Publik</td>
<td>68-73</td>
</tr>
<tr>
<td>Anang Usman dan Ida Hindarsyah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BIODATA PENULIS</td>
<td>74</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Pusdunan
Kemampuan Sumber Daya Manusia Daerah Dalam Merealisasikan Kebijakan Otonomi Daerah

Oleh : Kamal Alamsyah *)

Abstrak
Sikap dan perilaku yang bisa diamati sehari-hari kiranya belum banyak yang memahami bahwa sumber daya manusia merupakan investasi pembangunan baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Artinya, modal utama pembangunan adalah manusia sebelum memperhitungkan uang dan alat-alat. Sekalipun uang dan alat-alat tersedia tetapi kalau manusianya tidak mempunyai kemampuan untuk membangun maka upaya pembangunan dalam rangka merealisasikan otonomi daerah itu tidak akan berhasil.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia Dalam Kebijakan Otonomi Daerah

A. Pendahuluan

Sebagaimana dinyatakan dalam perencanaan pembangunan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, baik material maupun spiritual. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut setiap kebijakan dan program pembangunan selayaknya beranjak dari kondisi nyata sumber daya manusia. Kenyataannya menunjukkan bahwa pertimbangan pertimbangan kependudukan belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan atau karena implementasi di lapangan yang membuat aspek-aspek kependudukan seperti terabaikan. Bahkan ada yang hanya melihat penduduk dari sisi negatifnya sebagai masalah dalam pembangunan. Dalam hubungannya dengan otonomi daerah pertanyaan yang memerlukan jawaban adalah sejauh mana daerah itu sendiri memahami situasi dan kondisi kependudukan sebagai sumber daya manusia di daerahnya?

B. Orientasi Pembangunan

Secara konseptual dapat dipahami kalau sasaran pembangunan jangka panjang adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahteraan lahir batin. Dalam pernyataan tersebut terkandung kata-kata kunci yang harus dijabarkan secara rinci seperti: kualitas manusia, kualitas masyarakat, ukuran maju, ukuran mandiri, suasana tenteram, dan sejahtera lahir batin. Rasanya kata-kata kunci tersebut belum merealisasikan dalam kehidupan bahkan mungkin pemahamannya masih sangat terbatas.

*) Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Magister Ilmu Administrasi Pasca Sarjana Unpas
Sekalipun titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi tetapi peningkatan dan perluasan kegiatan-kegiatan ekonomi jangan sampai mengganggu bahkan merusak aspek-aspek manusianya. Perluasan industri memerlukan lahan yang cukup tetapi jangan sampai penduduk kehilangan tempat tinggal dan sumber pencarianan yang menjadikan kualitas sumber daya manusianya menurun. Peningkatan fasilitas perdagangan menuntut tempat-tempat yang strategis tetapi jangan sampai menggeser fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial yang justru diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Modernisasi industri dalam upaya meningkatkan produksi hendaknya diupayakan tidak mengganggu kesempatan kerja yang berdampak tehadap menurunnya kualitas kehidupan masyarakat.

Perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan hendaknya tidak hanya memperhatikan pemikiran ahli-ahli ekonomi saja, tetapi juga pemikiran pakar-pakar berbagai disiplin ilmu lainnya. "tidaklah salah kalau pembangunan ekonomi bertujuan untuk membuat kec yang sebesar-besarnya agar terjadi pembagian yang relatif lebih besar. Walaupun demikian asas keadilan dan pemerataan perlu dijadikan dasar pertimbangan, jangan sampai sebagian besar kue itu hanya dinikmati oleh sebagian kecil manusia Indonesia. Slogan bahwa pembangunan memerlukan pengorbanan jangan sampai diartikan sebagai suatu pengorbanan yang dirasakan menjadi penderitaan bagi sebagian besar anggota masyarakat.

Sebagai konsekuensi logis dari orientasi pembangunan pada sumber daya manusia, sejak awal perencanaan pembangunan semua aspek yang menyangkut keadaan dan kehidupan penduduk harus dipertimbangkan secara hati-hati dan matang. Dengan kata lain, aspek manusia dijadikan dasar pertimbangan secara integratif dengan aspek-aspek lainnya. Secara filosofis perlu dipertanyakan sejauh mana mantaat setiap program pembangunan mempunyai dampak positif terhadap pembangunan manusianya itu sendiri.

C. Kualitas Sumber Daya Manusia

Memahami keadaan sumber daya manusia Indonesia hendaknya melihat pada kondisi nyata dan permasalahan kependudukan secara umum. Permasalahan tersebut meliputi tingkat pertumbuhan yang, relatif masih tinggi, persebaran yang tidak merata, dan perbedaan pertumbuhan yang mencolok antara daerah daerah kota dengan daerah perdesaan. Dengan menggunakan angka rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia antara tahun 1980 dan tahun 1990 sebesar 1,98% per tahun, dengan melalui rumus "doubling time" jumlah angka penduduk Indonesia akan meningkat menjadi dua kali lipat dari 179 juta jiwa lebih pada tahun 1990 menjadi 358 juta lebih menjelang tahun 2026. Apabila melihat laporan-laporan hasil analisis Sensus Penduduk tahun 2000, kelihatannya kemungkinan itu tidak jauh meleset kecuali kalau terjadi perubahan besar karena perbaikan kesehatan atau bencana yang dahsyat.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dari segi kuantitas sumber daya manusia Indonesia cukup membanggakan dibanding negara-negara lain. Sampai saat ini Indonesia masih menduduki rangking nomor empat dalam jumlah penduduk dunia.
di bawah Cina, India dan Amerika Serikat. Tetapi apakah jumlah yang besar itu sudah merupakan jaminan sebagai modal pembangunan? jawabannya secara tegas “belum”. Keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Artinya, penduduk yang dapat menjamin keberhasilan pembangunan adalah penduduk yang mempunyai kualitas sesuai dengan program-program pembangunan yang dihadapi.

Masalah lain yang tidak mudah diatasi adalah persebaran antar daerah yang tidak merata terutama antara daerah kota dengan daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan indikasi ketidakseimbangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah akan mempengaruhi kegiatan pembangunan pada daerahnya masing-masing. Sedangkan dari segi kualitas tentu saja dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia yang berlainan. Dalam sistem sentralisasi masalah tersebut sulit untuk diatasi karena ketidak merataan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis, sumber daya alam serta perbedaan pertumbuhan dan ketimpangan fasilitas sosial ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Tingkat kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Aspek-aspek ini diperlukan dan mempengaruhi kehidupan manusia sejak kecil, baikan sejak dalam kandungan ibunya. Dengan kata lain, tingkat kualitas sumber daya manusia akan bergantung pada sejauhmana ketiga aspek tersebut dapat terpenuhi.

Aspek kesehatan tidak hanya menyangkut fasilitas pemeliharaan kesehatan secara medis tetapi juga termasuk kesehatan lingkungan dan kebersihan makanan, pakaian dan tempat tinggal sehingga dirasakan adanya kehidupan yang nyaman dan tenteram. Termasuk dalam aspek kesehatan adalah angka harapan hidup (expectation of life) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan masyarakat yang berhubungan erat dengan fasilitas kesehatan yang tersedia. Selain fasilitas dokter dan rumah sakit, termasuk dalam fasilitas kesehatan adalah tempat tinggal, sarana pencenrangan, sumber air, sanitasi, dan keamanan umum.

Tingkat kualitas sumber daya manusia dipengaruhi pula oleh macam dan tingkat pendidikan yang diperoleh penduduk. Pendidikan berpengaruh terhadap cara berpikir, daya nalar, wawasan, keluasan pengetahuan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan. Asumsinya, makin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi pula kemampuan dan tingkat kualitas manusia yang bersangkutan. Oleh karena itu, angka melek huruf termasuk ukuran yang digunakan dalam menganalisisis indeks pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa.

Terpenuhinya fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bergantung pada kemampuan ekonomi dan finansial manusia yang bersangkutan. Maksudnya, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan hanya bisa diperoleh dan ditingkatkan apabila mempunyai penghasilan yang memadai. Sedangkan kecukupan penghasilan bergantung pada sumber atau kegiatan
pekerjaan yang ditakukan. Seseorang tidak mungkin memperoleh fasilitas kesehatan dan tingkat pendidikan yang memadai kalau tidak mempunyai pekerjaan yang memberikan penghasilan yang mencukupi semua kebutuhan hidup yang diperlukannya.

Menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tuntutan yang mutlak untuk bisa bersaing dalam pergerakan dunia. Era globalisasi adalah era dimana sekretariat kebangsaan dihilangkan atau sedikitnya dinetralisasi sehingga, setiap bangsa mempunyai kebebasan untuk menembus wilayah bangsa lain. Oleh karena itu hanya manusia dengan kualitas unggul yang mempunyai kesempatan untuk memenangkan persaingan. Sebaliknya, manusia yang kualitasnya rendah akan selalu ketinggalan dan terpaksa mengekor pada manusia-manusia yang kualitasnya tinggi.

D. Pemberdayaan Masyarakat

KONSEP pemberdayaan mengandung pengertian sebagai upaya melimpahkan wewenang dan kepercayaan kepada pihak lain yang diberdayakan. Dalam konsep administrasi pemberdayaan merupakan realisasi dari "delegation of authority" dari atasan kepada bawahan dengan pertimbangan bahwa bawahan yang diberi wewenang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Konsekuensi dari pendelegasian wewenang adalah pihak yang diberi pelimpahan wewenang akan berusaha sekuat tenaga untuk memperlihatkan kemampuannya serta keberanian untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitasnya.

Kepentingan pelaksanaan suatu kebijakan, secara operasional pemberdayaan masyarakat bisa diartikan dalam dua tujuan utama. Pertama, menggali potensi yang ada dalam masyarakat untuk dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan sehingga implementasi kebijakan yang bersangkutan konsisten dengan keadaan masyarakat sendiri. Kedua, meningkatkan peranan masyarakat sebagai pendukung- setiap kebijakan dimana masyarakat menyambut baik dengan penuh pengertian dan tanggung jawab.

Pemberdayaan masyarakat baik dalam tujuan pertama maupun dalam tujuan kedua hanya bisa terlaksana apabila didahului dengan pengamatan secara mendalam terhadap kondisi nyata dari kehidupan masyarakat itu sendiri para perumus kebijakan perlu mempelajari dengan seksama berbagai macam karakteristik konteksual yang betul-betul berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat seharian. Kondisi nyata harus dihubungkan pula dengan kecenderungan - kecenderungan yang mungkin terjadi berdasarkan perubahan-perubahan secara umum.

Upaya mempelajari sikap dan perilaku masyarakat perlu disertai dengan analisis latar, belakang historis kehidupan masyarakat yang memungkinkan karakteristik khusus atau watak masyarakat setempat. Pada kehidupan masyarakat yang latar belakang historisnya penuh dengan dinamika
perjuangan akan menerima setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dengan sikap kritis. Sebaliknya pada kehidupan masyarakat yang latar belakang historisnya bersifat feudalistik akan menerima setiap kebijakan pemerintah sebagai suatu keharusan yang tidak bisa ditolak. Keadaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap upaya pemberdayaan dan keikutsertaannya dalam program-program pembangunan di daerahnya.

Partisipasi masyarakat yang sebenarnya akan terjadi apabila ada kesadaran dan pengertian terhadap kegiatan bersama yang dilakukannya. Masyarakat menerima dan turut melaksanakan kegiatan karena mereka memahami bahwa apa yang dikerjakan bersama itu bermanfaat bagi kehidupan mereka. Suasana tersebut dengan sendirinya akan mudah terjadi pada masyarakat yang dinamis, apalagi disertai dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pada masyarakat yang berlatar belakang feudalistik yang disertai dengan tingkat pendidikan relatif rendah, apalagi yang mempunyai pengalaman hidup dalam berbagai tekanan, suasana itu tidak mungkin terjadi tanpa dilakukan pemberdayaan oleh pihak pemerintah.

Perlu kiranya disadari bahwa selama ini ada pengalaman yang membuat masyarakat sulit untuk berpikir dan bersikap kritis, sekalipun secara umum pendidikan masyarakat sudah lebih baik. Orientasi vertikal ke atas dengan ukuran kebenaran dari atas membuat masyarakat yang ada di bawah tidak berdaya untuk menolak apa yang diberikan atau diharuskan dari atas. Para pemimpin di bagian tengah dan bawah lebih bersikap akomodatif untuk mengamankan perintah dari atas sehingga yang muncul bukan sikap pemimpin yang mengayomi bawahan tetapi sikap manager yang memelihara loyalitas terhadap atasan.

Kondisi seperti itu mengakibatkan tidak adanya inisiatif dari masyarakat karena kekhawatiran akan terjadinya benturan dengan keinginan atau kepentingan dari atas. Dengan sendirinya kreativitas masyarakat menjadi hilang dan sikapnya menjadi pasif karena hanya menerima apa adanya saja. Lebih jelek lagi keadaan seperti itu akan mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan terhadap kemampuan diri yang dimilikinya. Dalam keadaan demikian masyarakat betul-betul, tidak berdaya dan partisipasinya dalam pembangunan hanya bersifat semu.

E. Realisasi Otonomi Daerah

Berdasarkan konsep pemberdayaan, pelaksanaan otonomi daerah merupakan pemberdayaan terhadap daerah agar daerah mempunyai kemampuan untuk membangun daerahnya. Pergeseran sistem sentralisasi pada sistem desentralisasi dengan pelaksanaan otonomi yang selaras-luasnya menuntut kemandirian daerah untuk mengambil inisiatif pembangunan dengan mengembangkan kreativitas yang telah dimilikinya. Hal ini harus dilakukan dengan menggali berbagai potensi di daerahnya serta meningkatkan kemampuan yang ada.

Potensi daerah yang menjadi modal pembangunan di daerah terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam merupakan kekayaan yang akan menjadi modal utama apabila dikelola secara baik dengan menggunakan teknologi tepat guna. Selanjutnya sumber
daya alam dapat dikembangkan menjadi kekhususan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Kemampuan untuk mengembangkan sumber daya alam akan bergantung pada potensi ke dua, yaitu sumber daya manusia yang tersedia pada daerah yang bersangkutan.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya menyangkut penduduk atau anggota masyarakat umum, tetapi juga termasuk manusia dalam lembaga-lembaga pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan kedua macam sumber daya manusia tersebut perlu bekerja sama dengan penuh pengertian dan saling mempercayai. Melalui kerja sama yang harmonis seperti itu akan dapat menciptakan rasa tanggung jawab bersama yang pada akhirnya meahirkan rasa memiliki bersama (sense of belonging).

Agar supaya pelaksanaan otonomi mampu mengikuti perkembangan dan dapat menganitipasi era globalisasi maka perlu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan daerah. Salah satu diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan tiga aspek yang dijelaskan di atas. Walaupun demikian dalam pengembangan sumber daya manusia di lihat dari segi pendidikan ada ukuran umum dan ada ukuran khusus. Yang dimaksud ukuran umum adalah tingkat pendidikan secara umum yang sesuai dengan perkembangan sehingga kualitas sumber daya manusia daerah yang bersangkutan tidak ketinggalan oleh daerah-daerah lainnya. Sedangkan ukuran khusus adalah keahlian dari penduduk atau masyarakat setempat untuk mengelola potensi sumber alam setempat dan kegiatan-kegiatan di daerah.

Perlu kiranya disadari dan dipahami bahwa konsep otonomi daerah mengenal dan menghargai keanekaragaman dan perbedaan-perbedaan antar daerah. Pemikiran lama yang bersifat sentralistik yang semua kegiatan diukur dari pusat sehingga semuanya harus seragam sesuai keinginan pusat perlu diubah sesuai dengan asas pemberdayaan. Kehidupan daerah hendaknya disesuaikan dengan keadaan, daerah dan bukan dipaksakan untuk mengikuti kehidupan pusat yang mungkin saja tidak sesuai dengan kondisi daerah.

Demikian juga dalam lembaga pemerintah daerah, sumber daya manusia birokrasi daerah harus diukur berdasarkan kebutuhan daerahnya sendiri. Demikian juga pendirian unit-unit kerja atau macam lembaga hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di daerah. Mungkin saja terjadi adanya perbedaan syarat pendidikan untuk memegang suatu jabatan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Walaupun demikian upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam lembaga-lembaga pemerintah daerah harus tetap dilakukan agar supaya tidak ketinggalan dan mampu dalam berkompetisi.

Keberhasilan pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia para perumus kebijakan yang ada di daerah. Selain mempunyai kualitas nalar yang tinggi dan pertimbangan-pertimbangan yang
komprehensif, mereka hendaknya mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat setempat. Suatu strategi yang kiranya dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan yang diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah adalah:

Pertama, setiap perumusan kebijakan pembangunan oleh Pemerintah Daerah hendaknya mempunyai orientasi utama pada kondisi nyata yang ada di daerahnya. Maksudnya, konteks daerah harus menjadi prioritas pertama sebelum menghubungkan dengan dengan kepentingan atau kehendak Pusat.

Kedua, setiap perumusan kebijakan pembangunan yang dibuat Pemerintah Daerah harus dengan suatu pengamatan yang, mendalam terhadap kondisi nyata di daerah. Akan lebih baik lagi kalau dilakukan penelitian yang mendalam melalui lembaga yang independent sehingga bisa memberikan informasi yang obyektif dan netral.

Ketiga, penyebarrluasan setiap kebijakan pembangunan yang telah diambil sehingga dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Dalam hubungan ini hendaknya dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut memberikan masukan-masukan dan kritikan kritikan yang sifatnya pembangun untuk menyempurnakan kebijakan kebijakan selanjutnya.

Keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah harus diberdayakan dengan memciptakan suasana di mana anggota anggotanya mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya tanpa ada tekanan tekanan yang mengakibatkan sikapnya tidak obyektif dan rasional. Dengan kata lain, pemberdayaan sumber daya manusia dalam lembaga perwakilan harus menghilangkan kesan seolah-olah mereka hanya "pekerja-pekerja politik" yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan perintah dan perhitungan untung-rugi bagi dirinya sendiri.

F. Penutup

Realisasi kebijakan otonomi daerah hendaknya disertai dengan strategi pembangunan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Kemampuan tersebut berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia di daerah. Sumber daya manusia tidak hanya diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya alam, tetapi juga untuk menjadikan daerah mampu mengikuti perkembangan yang dihadapi, terutama dalam mengantisipasi era globalisasi yang menuntut keunggulan dalam persaingan.

Kemampuan sumber daya manusia daerah untuk membangun dan mengikuti persaingan ditentukan oleh kualitas yang dimilikinya. Secara makro tingkat kualitas sumber daya manusia menyangkut kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan secara mikro ukuran kualitas sumber daya manusia didasarkan pada kebutuhan pembangunan daerah setempat serta nilai-nilai yang dianut masyarakat.
Sesuai dengan pemikiran bahwa otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah agar bisa membangun berdasarkan kemampuan daerahnya, maka daerah harus diberikan kebebasan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya sendiri. Tuntutan ini berlaku baik bagi anggota masyarakat umum maupun bagi aparat atau anggota lembaga-lembaga pemerintahan daerah, termasuk para perumus kebijakan yang mengatur strategi pembangunan setempat. Oleh karena itu perlu disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang walaupun sibuk dengan tugas-tugas rutinnya tetap masih berusaha meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka


Dokumen Lain :

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.